

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini, masalah kemiskinan sudah menjadi fenomena kehidupan masyarakat, dengan kata lain telah mengakar luas dalam suatu sistem sosial masyarakat Indonesia. Terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan, semakin memperparah kondisi masyarakat yang tergolong miskin. Hal ini dapat terlihat dari menyebarnya kantung kemiskinan pada lokasi-lokasi yang terisolasi, menurunnya gizi masyarakat, merosotnya berbagai kegiatan ekonomi rakyat yang mengakibatkan semakin rendahnya pendapatan masyarakat.

Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan (Soegijoko, 1997:137).

Tantangan utama dalam jangka pendek untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin tersebut melalui pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif, serta penyediaan jaminan dan perlindungan sosial. Perlu dilakukan penanggulangan kemiskinan secara komperhesif dan terpadu agar terjadi perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ( Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Propenas).

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan ada dua strategi utama yang ditempuh. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin

melalui pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Kedua, memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha dan mencegah terjadinya kemiskinan baru (UU No.25 Tahun 2000 tentang Proenas).

Berbagai program pengentasan kemiskinan pun telah diupayakan dan di gagas, baik oleh pemerintah maupun organisasi di luar pemerintah (sektor swasta, NGO, *donor agency*). Namun, karena keterbatasan peran didalam perlibatan pengentasan kemiskinan, program-program yang telah dilakukan pemerintah sering kali tidak berkesinambungan dan kurang maksimal, bahkan cenderung tidak tepat dan tidak banyak masyarakat yang tahu mengenai apa saja program-program yang ada. Oleh karenanya, kondisi kemiskinan di Indonesia nampaknya tidak mengalami perubahan atau kemajuan di bandingkan dengan kondisi lainnya, seperti perkembangan demokrasi. Bahkan dalam keadaan demokrasi yang berubah kemiskinan di Indonesi tetap menunjukkan gambaran yang memprihatinkan (Maarif, Azra dan Markus, 2007).

Dengan hal nya kemiskinan di Desa, bukan karena kekurangan atau ketidakmampuan mengembangkan usaha. Kemiskinan di desa terjadi karena keterbelakangan populasi desa dimanfaatkan, dimanipulasi untuk mengambil alih penguasaan dan pengelolaan sumber daya mereka. Sehingga, warga desa di anggap tidak mampu mengelola sumber daya yang tersedia.

Oleh sebab itu, fenomena seperti ini perlu mendapat perhatian yang serius, terutama dari pihak pemerintah selaku pengambil kebijakan dalam memberikan bantuan program penanggulangan kemiskinan. Sebab, efektivitas pelaksanaan

suatu program sangat tergantung pada kemauan, kemampuan penduduk serta pihak konsultan, fasilitator, dan pemerintah sebagai mitra kerja.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintahan dalam meningkatkan kemiskinan yaitu melalui pembangunan. Paradigma telah mengalami perubahan, dari pembangunan yang bertumpu pada negara, menjadi pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau yang lebih dikenal dengan istilah pembangunan masyarakat (*community development*). Dalam hal ini pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan, diantaranya adalah skim tabungan keluarga sejahtera (Taksera) dan kredit keluarga sejahtera (Kukesra) atas kerjasama antara BKKBN dan yayasan dana mandiri yaitu yayasan yang membantu pengentasan kemiskinan, penyaluran beras untuk rakyat miskin, jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin, bantuan langsung tunai (BLT) dan sebagainya.

Pendekatan ekonomi keluarga salah satu upaya yang dilakukan BKKBN dalam menurunkan kemiskinan. Program yang dirintis adalah menumbuhkan dan mengembangkan kelompok kegiatan (Poktan), usaha peningkatan pendapat keluarga sejahtera (UPPKS), peningkatan kesejahteraan melalui upaya pemberdayaan keluarga merupakan terobosan untuk mempercepat transformasi kegiatan non sosial ekonomi menjadi usaha ekonomi. Pemberdayaan keluarga dibidang ekonomi bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat,

semangat, dan keterampilan keluarga dalam bidang usaha ekonomi produktif. Melalui upaya ini, keluarga khususnya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I mampu memanfaatkan peluang usaha yang ada dalam rangka pembelajaran usaha ekonomi produktif pada skala rumah tangga.

Untuk itu yang harus dilakukan adalah memberdayakan keluarga pra sejahtera menjadi sejahtera yang diharapkan agar keluarga-keluarga tersebut dapat lebih peduli dengan perkembangan dan peningkatan pendidikan anak-anak mereka. Pemberdayaan ekonomi keluarga merupakan program yang memberikan kesempatan kepada keluarga kurang mampu untuk berusaha dalam rangka pemenuhan hidup sehari-hari.

Oleh sebab itu alasan mengapa penelitian ini dilakukan adalah, *pertama*, mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1996 tentang pembangunan keluarga sejahtera dalam rangka penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan dan ditingkatkan pemberdayaan keluarga melalui sektor ekonomi. Diharapkan dengan perbaikan pada sektor ekonomi tersebut, kebutuhan pokok manusia dapat terpenuhi, termasuk didalamnya peningkatan pendidikan bagi semua anggota keluarga terutama anak sebagai penerus keturunan yang dapat dijadikan pemutus rantai kemiskinan bagi keluarga kurang mampu. Sehingga setiap masyarakat harus mengetahui apa saja program pemberdayaan yang ada di pemerintahan suatu desa agar program tersebut dapat berkembang dan masyarakat pra sejahtera bertahap menjadi masyarakat sejahtera.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan, masalah mengenai apa saja program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat pra sejahtera menjadi masyarakat sejahtera di Desa Licin dapat ditarik beberapa masalah yaitu :

1. Kurangnya sosioalisasi mengenai program-program tersebut kepada masyarakat kurang mampu.
2. Kurangnya perhatian dari pemerintahan setempat mengenai masyarakat yang kurang mampu.
3. Tidak ada rasa peduli dari masyarakat kurang mampu terhadap program pemberdayaan pemerintah.
4. Kurangnya peran masyarakat sekitar agar dapat meningkatkan program pemberdayaan masyarakat kurang mampu.

Adapun program-program pemberdayaan yang ada jika dilaksanakan dengan baik maka akan berkembang menjadikan masyarakat prasejahtera menjadi masyarakat sejahtera.

5. Kurangnya kesadaran dari dirinya sendiri untuk merubah taraf hidupnya dan hanya menikmati apa yang sudah ada.

## 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang ditekankan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja program pemberdayaan masyarakat pra sejahtera di Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ?

2. Bagaimana mekanisme pemberdayaan dan pengembangan program tersebut kepada masyarakat di Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ?
3. Bagaimana hasil pencapaian program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat pra sejahtera menjadi masyarakat sejahtera di Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian disini yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat pra sejahtera menjadi masyarakat sejahtera.
2. Agar masyarakat mengetahui bagaimana mekanisme pemberdayaan dan pengembangan program tersebut.
3. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam menjadikan masyarakat pra sejahtera menjadi masyarakat sejahtera dengan pemberdayaan dan pengembangan program tersebut.

#### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Ada beberapa hal dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis maupun praktis dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya :

1. Secara Akademis

Untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam meningkatkan keluarga pra sejahtera menjadi keluarga sejahtera dengan program pemberdayaan yang ada dan dapat berguna bagi pengembangan ilmu

pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat, serta memberikan pengaruh positif bagi kegiatan pemberdayaan yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Desa setempat.

## 2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan pada semua pihak yang terkait dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat oleh :

1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat

2) Pemerintah Desa Licin

Untuk lebih memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan dan terus mengembangkan tiap program yang ada agar lebih terciptanya masyarakat yang kompeten.

3) Pemerintah Kecamatan Cimalaka

Sebagai pengawas untuk setiap kegiatan dan program agar berjalan dengan baik.

4) Serta Tokoh Masyarakat sekitar

### 1.6. Kerangka Pemikiran

Fungsionalisme struktural adalah salah satu paham atau prespektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian – bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Kemudian, perubahan yang terjadi pada salah satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian yang lain. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa semua elemen atau unsur

kehidupan masyarakat harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat secara keseluruhan bisa menjalankan fungsinya dengan baik. (Geore Ritzer, 2013)

Sepanjang teori ini, masyarakat terdiri dari berbagai elmen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Elmen- elmen itu antara lain adalah ekonomi, politik, hukum, agama, pendidikan, keluarga, kebudayaan, adat – istiadat, dan lain –lain. Masyarakat luas akan berjalan normal jika masing – masing elmen atau instansi menjalankan fungsinya dengan baik. Sama halnya dengan suatu pemerintah yang berfungsi mengayomi masyarakatnya agar sejahtera, begitupun mengenai kemiskinan yang terjadi dengan adanya program pemberdayaan yang di buat oleh pemerintah agar tidak ada masyarakat miskin. Maka dari itu, fungsi pemerintah harus berjalan dengan baik kepada masyarakatnya karena jika tidak berjalan dengan baik maka akan terjadi disfungsi dan menyebabkan ketidaseimbangan antara peran pemerintah kepada masyarakatnya.

Pemerintahan desa, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat – istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dibentuk atas asas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal –usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat (Taliziduhu Ndraha, 1991 :91).

Di dalam satu desa terdapat berbagai fenomena kemiskinan yang terjadi, berbagai program pengentasan kemiskinan pun telah di upayakan dan di gagas, baik oleh pemerintah maupun organisasi di luar pemerintah, namun keterbatasan



peran dalam melibatkan pengentasan kemiskinan, program – program yang dilakukan sering kali tidak berjalan dengan baik dan kurang maksimal. Oleh karena itu kemiskinan di Indonesia nampaknya tidak mengalami perubahan atau kemajuan di banding kondisi lainnya, seperti perkembangan demokrasi. Bahkan dalam keadaan demokrasi yang berubah pun kemiskinan di Indonesia tetap menunjukkan gambaran yang memprihatinkan.

Oleh sebab itu, fenomena seperti ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari pihak pemerintah selaku pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam memberikan bantuan program penanggulangan kemiskinan, sehingga meningkatnya populasi masyarakat di Indonesia dapat terkontrol dengan baik agar tidak manambah kepadatan di Inonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan yaitu melalui pembangunan. Dalam hal ini, pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pendekatan ekonomi keluarga salah satu upaya yang dilakukan BKKBN dalam menurunkan kemiskinan. Program yang dirintis adalah menumbuhkan dan mengembangkan kelompok kegiatan (Poktan), usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS). Program tersebut terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Peningkatan kejehateraan melalui upaya pemberdayaan keluarga merupakan terobosan untuk mempercepat transformasi kegiatan non sosial ekonomi menjadi usaha ekonomi.

Maka dari itu, pentingnya peningkatan program penanggulangan kemiskinan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan kebijakan sehingga program tersebut berjalan dengan baik sesuai apa yang di harapkan. Memberikan program – program yang ampuh dalam mengentas kemiskinan di berbagai pelosok Indonesia.

